3

TANTANGAN KIPRAH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DI INDONESIA**Oleh:****Agustus Fajar & Rudi Saprudin Darwis****(agustus.cimahi@gmail.com; rudi.darwis@unpad.ac.id)****ABSTRAK**

Profesi pekerjaan sosial di Indonesia sedang berkembang membangun eksistensinya. Globalisasi saat ini menjadi pemicu yang sangat efektif untuk menggerakkan semua lini profesi pekerjaan sosial. Perkembangan ini telah memberikan tuntutan yang kuat terhadap profesi ini untuk dapat menunjukkan praktik nyata dan berkontribusi secara signifikan sebagai sebuah profesi. Penegasan pekerjaan sosial sebagai profesi melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial menjadi sebuah capaian yang harus diupayakan terus-menerus. Untuk mendukung hal tersebut, penguatan infrastruktur dan suprastruktur yang terkait sertifikasi dan standarisasi dilakukan pada berbagai tingkatan dan berbagai sektor.

Kata kunci: pekerja sosial, profesi, standarisasi, sertifikasi

PENDAHULUAN

Profesi pekerjaan sosial di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari pengaruh luar dan pengaruh dalam. Pengaruh luar dimaksud terkait dengan hubungan antar negara, terutama dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Pengaruh dalam dimaksud terkait dengan perkembangan organisasi profesi, pendidikan profesi, dan peraturan-peraturan yang mengatur dan menyangkut profesi pekerjaan sosial. Salah satu yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia yaitu kesepakatan mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada Konferensi Tingkat Tinggi di Kuala Lumpur Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Selanjutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi di Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN *Security Community* dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Konferensi tersebut ditindaklanjuti melalui pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang bersepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas beserta jadwal pelaksanaannya.

Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin negara ASEAN

menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, pekerja sosial profesional, dan lainnya. MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya.

Terkait dengan MEA sebagai salah satu wujud adanya globalisasi, industrialisasi dan privatisasi telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, komunitas, relasi manusia dan nilai-nilai sosial. Hal ini telah menimbulkan kualitas dan kuantitas masalah sosial yang semakin kompleks dan meningkat. Selama era sentralisasi di Indonesia, banyak hal dilakukan langsung oleh pusat. Namun semakin lama desakan daerah memperjuangkan kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat semakin besar. Munculah desentralisasi, penguatan peran masyarakat dan partisipasi swasta.

Sementara itu, perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia tidak lepas dari keberadaan ikatan profesi pekerjaan sosial. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) adalah nama organisasi profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Pada Anggaran Dasarnya disebutkan, IPSPI didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Tujuan IPSPI sebagaimana disebutkan pada Anggaran Dasarnya adalah:

- 1) Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia,
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan professional Pekerja Sosial Indonesia,
- 3) Memberikan arah bagi standarisasi praktek pekerjaan sosial dan izin praktek bagi pekerja sosial,
- 4) Memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat penerima pelayanan Pekerja Sosial,
- 5) Membina kerjasama guna kemajuan dalam pengembangan keilmuan dan profesionalisme anggota melalui pemupukan rasa kekeluargaan sesama anggota dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri,
- 6) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai tujuan itu, usaha-usaha yang diadakan adalah:

- 1) Melaksanakan registrasi anggota sesuai dengan persyaratan,
- 2) Penelitian dan pengembangan pekerjaan sosial. Dalam bidang penelitian, mendorong makin berkembangnya kondisi yang memungkinkan kegiatan penelitian, pembinaan tenaga peneliti dan mengintensifkan publikasi hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah serta mendorong kegiatan penelitian baik melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bidang pengembangan ilmu dan profesi dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan metoda, kebijakan dan praktek pekerjaan sosial serta di lembaga pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini antara lain dilakukan melalui temu ilmiah, seminar ataupun symposium,

- 3) Praktek pekerjaan sosial professional yaitu praktek pelayanan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan metoda praktek pekerjaan sosial,
- 4) Pembinaan anggota,
- 5) Melaksanakan pengembangan pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan professional, karir dan kesejahteraan anggota,
- 6) Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ilmiah dalam dalam rangka pengembangan profesi maupun untuk memecahkan berbagai permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat,
- 7) Menerbitkan media profesi,
- 8) Menyediakan berbagai fasilitas bagi kemudahan praktek pekerjaan sosial bagi para anggotanya,
- 9) Melakukan pembinaan terhadap para calon/asisten pekerja sosial dalam rangka meningkatkan standard praktek minimal,
- 10) Melaksanakan pembangunan nasional Indonesia pada umumnya, serta secara khusus pembangunan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi Pekerjaan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial. Selain itu IPSPI mengatur status keanggotaan lainnya yaitu anggota rekan. Anggota rekan yaitu mereka yang tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial namun berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan mendaftarkan keanggotaannya di IPSPI. Keberadaan organisasi profesi sebagai wadah bernaung menjadi langkah penting dalam membangun akuntabilitas pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi yang mampu merespon

perubahan dan perkembangan lingkungan pada berbagai aspek.

Perubahan-perubahan sosio-budaya, ekonomi bahkan politik yang begitu cepat telah memberi implikasi kepada profesi pekerjaan sosial. Demikian pula penerapan ISO yang diberlakukan di negara maju merupakan tantangan yang harus direspon. Profesi pekerjaan sosial harus didorong terus sehingga mampu menerapkan standard yang bersifat nasional bahkan internasional. Oleh sebab itu, pendidikan dan latihan serta standarisasi dan sertifikasi pekerjaan sosial memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk '*direction*' dan eksistensi profesi pekerjaan sosial. Sebagai bentuk upaya meneguhkan keberadaan profesi pekerjaan sosial sebagai profesi yang akuntabel, maka pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Sosial RI No.18/HUK/2009 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.¹⁶ Peraturan Menteri yang telah memberikan payung hukum dan legalitas dan sertifikasi dalam bidang praktek pekerjaan sosial juga tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. Oleh karena itu, pekerja sosial didorong untuk merealisasikan amanat tersebut.

Isue masalah masyarakat Indonesia saat ini

Perkembangan lingkungan yang terjadi pada tingkat domestik, regional, maupun global berimplikasi terhadap kehidupan bermasyarakat dan mewarnai berbagai bidang kehidupan. Berbagai isue pada beberapa bidang yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan domestik, regional, maupun global membawa Indonesia pada situasi yang kritis, yang membutuhkan penanganan dimana pekerja sosial dapat menajdi bagiannya. Beberapa isue yang teridentifikasi dalam kaitannya dengan perkembangan lingkungan tersebut adalah:

¹⁶ Permensos RI tentang sertifikasi Pekerja Sosial ini telah mengalami beberapa penyempurnaan. Penjelasan mengenai perubahan Permensos RI tentang sertifikasi pekerja sosial dapat dilihat pada

tulisan Darwsi yang berjudul "Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia" pada jurnal Share Vol. 6 No. 1, Juli 2016.

1. Demokrasi, otonomi daerah dan *good governance*

Pada bidang ini, isue-isue yang muncul meliputi permasalahan:

- *Issue-issue primordial* (krisis kepercayaan, konflik etnik dan kedaerahan).
- Negara (pusat) mendistribusikan tugas dan tanggungjawab pembangunan dan pemecahan masalah sosial kepada daerah.
- Daerah mempunyai otonomi untuk menata struktur pemerintahan, ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial.
- Politisasi massa.

Selain terjadinya masalah, pada bidang ini pun muncul pula beberapa peluang yang akan berguna bagi pembangunan, yaitu:

- Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan institusi lokal untuk menunjang program pembangunan daerah dan nasional.
- Perlu peningkatan kadar dan mutu pelayanan sosial untuk mengatasi masalah sosial.
- Perlu SDM pekerja sosial baik yang terampil maupun yang ahli.
- Ketertiban dan kepatuhan hukum dan Resolusi konflik
- Peningkatan peran pasar dan sektor nirlaba sehubungan dengan perampangan kewenangan dan tugas pemerintah.

2. Akses Informasi Nirbatas

Permasalahan yang muncul dengan semakin mudah dan tidak terbatasnya akses terhadap informasi adalah penyalahgunaan sarana informasi (seperti pornografi dan pornoaksi), pelecehan seksual, serta penyalahgunaan substansi. Selain permasalahan, hal-hal yang muncul dari semakin terbukanya dan tidak terbatasnya akses informasi adalah adanya peluang-peluang yang meliputi: perluasan jaringan pelayanan social, peningkatan

kualitas pelayanan social, dan dukungan terhadap advokasi hak orang-orang terpinggirkan (*Community Action*)

3. Pasar global dan gejala post-industrialis

Permasalahan yang muncul seiring dengan adanya pasar global dan gejala post-industrialis mencakup kondisi dan struktur keluarga serta kehidupan sosialnya. Struktur keluarga cenderung menjadi keluarga nuklir dan cosmopolitan. Selain itu, terjadi juga alienasi post-modernis yang ditandai dengan adanya keterasingan pada orang-orang yang berada dalam kehidupan masyarakat yang sibuk. Dalam masyarakat yang demikian, fungsi keluarga pun mengalami marginalisasi. Keluarga yang tadinya diharapkan akan menjadi tempat mencetak calon-calon anggota masyarakat terampil, sehat dan membawa masyarakat ke arah kemajuan, mampu membangun kehidupan sosial dan jaringan sosial yang baik.

Adanya daya tarik kota yang kuat membuat warga desa berlomba-lomba untuk dapat memanfaatkan sumberdaya di perkotaan. Ketidaksiapan mereka untuk menjalani hidup di perkotaan dan ketidakmampuan kota menyediakan sumber menyebabkan tumbuhnya kemiskinan di perkotaan. Kota-kota besar selalu menjadi daerah yang menarik untuk dijadikan tujuan sehingga dibanjiri oleh para urbanisasi.

Bila memperhatikan struktur keluarga yang terjadi pada masa kini, maka akan ditemui strukturnkeluarga yang semakin ramping. Keluarga-keluarga cenderung hidup sebagai keluarga inti semata. Mereka seolah-olah teripsah dari kelaurga besarnya. Segala kebutuhan dan permasalahan yang dialami keluarga akan diatasi secara mandiri oleh keluarga intinya. Keluarga besar tidak memberikan pengaruh yang cukup berarti kepada keluarga inti. Hubungan-hubungan sosial lebih banyak dibangun melalui kegaitan-kegiatan yang instrumental pada organisasi-organisasi yang sifatnya

sekunder. Pertemuan keluarga besar dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara semi formal seperti arisan keluarga atau pada saat hari raya keagamaan.

Pada sisi yang lain, globalisasi juga membuka peluang untuk berkembangnya berbagai bentuk pelayanan sosial yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan permasalahannya. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari negara lain dalam menangani persoalan yang terjadi. Berbagai bentuk pelayanan sosial yang sudah dikembangkan di negara lain dapat diadopsi untuk dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan di Indonesia. Globalisasi juga membuka pemikiran baru dalam melihat permasalahan dan penyelesaiannya. Pengkajian komponen sosial dengan disiplin ilmu lain. Dengan dukungan ilmu sosial interpretif dan ilmu sosial kritis yang tidak “mengharamkan” nilai dalam penelitian dan analisisnya, dapat mendukung pengembangan dan penguatan landasan keilmuan, dan kerangka teori pekerjaan sosial.

Komunikasi dan informasi yang semakin terbuka dengan semakin canggihnya teknologi dan media komunikasi. Dengan teknologi komunikasi yang semakin baik, maka seolah-olah setiap orang dapat melakukan komunikasi setiap saat tanpa terbatas. Seolah-olah tidak ada batas diantara pihak-pihak yang berinteraksi. Batas negara tidak lagi menjadi halangan bagi mereka untuk berkomunikasi. Berbagai kemungkinan bentuk informasi yang berasal dari luar akan masuk dan bersentuhan dengan kondisi lokal. Informasi yang masuk senantiasa disertai nilai-nilai yang mempengaruhi nilai dan budaya masyarakat. Interaksi dengan budaya masyarakat lain akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat.

Di sisi yang lain, komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan jaringan/networking dengan sektor-sektor atau

lembaga/departemen lain. Kebutuhan penyediaan sumber untuk penyelenggaraan pelayanan akan semakin banyak alternatifnya dengan berjejaringan. Sumber-sumber yang tidak dapat disediakan sendiri dapat dengan mudah diperoleh dari pihak lain yang berjejaringan dengannya. Pengembangan jaringan juga secara tidak langsung menanamkan kesadaran akan adanya keterbatasan yang dimiliki olehnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan.

4. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi

Permasalahan yang juga terjadi adalah pada aspek sosial ekonomi dimana terjadi kesenjangan kesenjangan ekonomi atau ketidaksetaraan ekonomi. Permasalahan yang terjadi pada sebagai akibat dari ketidaksetaraan ekonomi adalah terjadinya keterbelakangan, yaitu masyarakat tidak mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat lainnya. Selain itu terjadi pula keterlambatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Terjadi pula kondisi dimana banyak warga masyarakat yang mendiami rumah yang tidak layak huni.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, terdapat beberapa peluang ataupun kesempatan untuk memperbaiki kondisi seperti itu. Beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan antara lain adalah menyelenggarakan pelayanan yang berbasis masyarakat dengan cara melakukan pengembangan masyarakat. Selain itu, dapat pula dilakukan penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan sosial dengan mengembangkan program-program pelayanan. Dapat pula menyelenggarakan program-program perlindungan sosial untuk memperbaiki dan menjaga warga masyarakat agar tidak mengalami masalah yang berkelanjutan.

5. Peningkatan Risiko/Kebencanaan

Permasalahan yang juga mengancam masyarakat adalah masalah yang bersumber dari kondisi lingkungan. Permasalahan yang terjadi ini bisa disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang tidak memiliki kepekaan sosial. Dia tidak bisa melihat bahwa perbuatan manusia terhadap lingkungan yang salah mengakibatkan kerusakan dan melemahkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, permasalahan ini dapat disebabkan kondisi alam yang diluar kendali manusia. Dampak dari adanya bencana ini adalah korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan yang parah dan melemahkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, kerugian material akibat dari rusaknya lingkungan.

Beberapa upaya dapat dilakukan oleh warga masyarakat melalui berbagai fasilitasi dan dukungan berbagai pihak. Bentuk upaya tersebut adalah berupa manajemen bencana, peningkatan resistensi dan resiliensi yang sangat bagus. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga mengatasi permasalahan dan mendukung anggota keluarga untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan..

Pekerjaan Sosial Sebagai Solusi

Mencermati perkembangan masalah masyarakat serta berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, pekerjaan sosial dapat menjadi bagian dari upaya penyelesaian masalah tersebut. Sebagai salah satu profesi pemberian pertolongan, khususnya dalam pertolongan masalah-masalah kemanusiaan, pekerjaan sosial memiliki metode dan pendekatan yang dikembangkan sebagai perangkat dalam pemberian pertolongan. Sebagaimana yang disampaikan oleh IFSW (2000) bahwa *“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being.*

Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Pekerja Sosial bukanlah kegiatan *“charity”*, *“relief”*, dan *“dole out”*. Akan tetapi merupakan tenaga yang terdidik, terlatih dan profesional untuk turut terlibat mengatasi permasalahan sosial.

Dari definisi tersebut juga nampak bahwa fungsi pekerjaan sosial adalah (1) Mendorong perubahan sosial; (2) Pemecahan masalah dalam hubungan kemanusiaan; (3) Pemberdayaan dan pembebasan; (4) Pencapaian kesejahteraan, Sebagai sebuah profesi, mekanisme kerja yang dikembangkan pekerjaan sosial didasarkan pada teori-teori dikembangkannya, yaitu teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial khususnya yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungan mereka. Dalam praktiknya, pekerjaan sosial didasarkan pada nilai-nilai yang sangat fundamental bagi praktik pekerjaan sosial, yaitu penghormatan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Adapun tujuan dari Pekerjaan Sosial adalah untuk mendorong pembangunan kesejahteraan sosial berkelanjutan. Untuk merealisasikannya, maka pekerjaan sosial mengupayakan untuk beberapa hal, yaitu: (1) Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah; (2) Membantu memperoleh sumber, (3) Membuat organisasi responsive dalam memberikan pelayanan sosial; (4) Memberikan fasilitas interaksi antara individu dengan individu dalam lingkungan mereka; (5) Mempengaruhi interaksi antara organisasi dengan institusi; dan (6) Mempengaruhi kebijakan sosial.

Beberapa Kecenderungan Pasar Pekerjaan Sosial

Dalam perkembangannya, pekerjaan sosial menjalankan fungsinya dalam berbagai arena. Di Indonesia, mayoritas pekerja sosial dipekerjakan oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial pada beberapa program

yang diselenggarakannya seperti menjadi Sakti Peksos dan Pendamping PKH. Selain itu, beberapa arena tempat para pekerja sosial di Indonesia berkiprah adalah Sub-sub sektor konvensional pelayanan kemanusiaan berupa panti-panti.

Fenomena lain yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya kebutuhan pekerjaan sosial di sektor swasta untuk pelayanan-pelayanan khusus (HIV/AIDS, NARKOBA, Manula, Hospice), pekerjaan advokasi dan aplikasi dengan LSM, bekerja di LSM lokal, nasional dan internasional. Namun selain itu, para pekerja sosial tidak selalu harus bekerja untuk pihak lain. Dia dapat bekerja sendiri sebagai “*social entrepreneur*”.

Relevansi dengan Standarisasi dan Sertifikasi

Salah satu ciri dari suatu profesi adalah adanya standarisasi dalam hal kapabilitas dan kompetensi pelakunya. Seperti dinyatakan Mandinberg (dalam Dorita:2010) bahwa standarisasi adalah suatu proses yang tidak terelakan. Standarisasi adalah kepentingan profesi, penting bagi kita untuk memiliki titik persamaan untuk jangka panjang, walaupun standarisasi bukanlah hal yang besar bagi konsumen dan pasar karena bila produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik, pasar tidak terlalu melihat standarisasi sebagai ukuran.

Bagi suatu profesi, standarisasi kompetensi yang menjadi dasar untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu sertifikasi adalah untuk:

1. Artikulasi dan advokasi profesi.
2. Tuntutan kualiti (standar).
3. Tuntutan akuntabiliti (prinsip).
4. Monopoli bidang kerja dan pembatasan pasokan pasar.

Kelebihan sertifikasi profesi: Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional. Meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut Menambah wawasan baru yang tidak didapat pada saat menempuh pendidikan formal. Dapat

meningkatkan posisi dan juga reputasi si profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan.

Memasuki era globalisasi dengan tingkat persaingan yang tinggi diperlukan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja bidang tertentu, professional, berkualitas tinggi, dan mampu bersaing sesuai dengan tuntutan zaman. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi merupakan suatu tuntutan dunia profesi yang tidak dapat dihindari karena kompetensi tenaga kerja selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal dimaksud, perlu disusun Standar Kompetensi Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial.

Tantangan globalisasi dan peningkatan kuantitas serta kualitas masalah sosial memerlukan SDM yang handal yang memiliki *knowledge, skill & attitude* agar dapat meningkatkan mutu pelayanan. SDM Pekerjaan Sosial memainkan peranan penting dalam merespon perubahan tersebut. Kadar dan mutu pelayanan sosial sangat ditentukan oleh kualitas SDM Pekerjaan Sosial.

Pendidikan pekerjaan sosial merupakan pencerminan dan bentuk respons terhadap perubahan sosio-ekonomi-budaya bahkan politik sebuah masyarakat. Kualifikasi dan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial tercermin dari kompetensi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. *Knowledge + Skills + Values = Competence*. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendidikan berbasis kompetensi.

Untuk menjamin penyelarasan antara pendidikan dan dunia kerja atau pasar/industry, diperlukan langkah-langkah *Link and Match* antara pendidikan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat/pemerintah sesuai dengan prioritas pembangunan. Upaya penjaminan ini diperlukan untuk memastikan adanya penyediaan SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memadai pada semua tingkatan. Kebutuhan SDM tidak hanya dalam konteks lokal, melainkan nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, Standar

kompetensi harus memperhatikan standar global, regional, nasional maupun lokal.

Pendidikan pekerjaan sosial harus melakukan *reinventing* terhadap perubahan sosial, situasi politik dan budaya tradisional sekalipun. Lembaga pendidikan tidak dapat mengabaikan perkembangan kebutuhan kualitas pekerja sosial dengan kualitas lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan pekerjaan sosial yang diselenggarakan harus mampu bekerja secara efektif sesuai dengan tuntutan permasalahan. Hal ini tentu saja akan berimplikasi luas terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial, baik pada aspek infrastruktur maupun suprastrukturnya.

Agar para pekerja sosial mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sebagai pekerja sosial profesional, sistem pendidikan pekerjaan sosial perlu direorganisasi secara mendasar. Reorganisasi bisa mencakup kurikulum, proses pendidikan, tenaga pengajar, pembimbing praktik lapangan, perpustakaan, buku teks, ataupun laboratorium lapangan pekerjaan sosial tempat para mahasiswa melakukan praktik lapangan. Departemen Pendidikan Nasional perlu mereview dan mengevaluasi kurikulum pendidikan pekerjaan sosial yang ada dan mereorganisasinya.

Untuk kelengkapan standarisasi dan sertifikasi pekerjaan sosial, perlu dikaji dan ditindaklanjuti tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberian lisensi atau ijin praktek, asesor serta uji kompetensi untuk pekerja sosial profesional.

Peranan Pemerintah

Dalam pengdsayagunaan sumberdaya manusia pekerja social peran pemerintah cukup strategis. Berbagai kebijakan dapat dibuat untuk mengoptimalkan keberadaan pekerja sosial untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian masalah sosial. Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mengambil peran dan tanggungjawab untuk mendayagunakan SDM Pekerjaan Sosial, untuk berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Salah satu

implementasinya adalah penunjukkan pekerja sosial di tingkat kelurahan/desa.

Untuk penyelarasan antara kebutuhan pasar kerja dengan dunia pendidikan, Pemerintah Pusat dan daerah sepatutnya menganalisis kebutuhan SDM secara terperinci yang diperlukan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kepada mereka selanjutnya diberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Pusat dan daerah.

Organisasi profesi khususnya di daerah perlu mempergiat advokasi terhadap kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan semangat OTDA.

Dalam Undang-Undang Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial (sebagai pengganti UU No. 6/1974) tidak ada pasal yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi pekerja sosial profesional. Karena itu perlu dibuat UU khusus tentang pekerjaan sosial yakni siapa pekerja sosial profesional, persyaratan, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, remunerasi pekerja sosial, serta kewajiban bagi lembaga pelayanan sosial menggunakan pekerja sosial profesional sesuai dengan jenis dan beban tugas dan jumlah kelayannya. Hal ini perlu ada demi pelayanan profesional bagi warga masyarakat tidak beruntung yang sebagai warga Negara berhak atas kehidupan mereka.

Penutup

Di balik masalah-masalah diatas terdapat sejumlah peluang untuk berkiprahnya pekerja sosial profesional di Indonesia. Tumbuhnya kesadaran dan tuntutan masyarakat akan hak-haknya termasuk hak akan kehidupan layak, kesejahteraan, keadilan, perlindungan sosial dan HAM serta berkembangnya partisipasi masyarakat sipil, organisasi-organisasi bukan pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial juga semakin membuka peluang bagi peran dan kiprah pekerja sosial profesional.

Dukungan ilmu sosial interpretif dan ilmu sosial kritik yang tidak “mengharamkan” nilai dalam penelitian dan analisisnya, dapat

mendukung pengembangan dan penguatan landasan kelimuan, dan kerangka teori pekerjaan sosial.

Penataan ulang, penguatan dan pengembangan profesi pekerjaan sosial pada dasarnya bukan untuk kepentingan pekerjaan sosial itu sendiri, tetapi untuk kepentingan profesionalisme penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menjamin kualitas, efektifitas, ketanggapan, akuntabilitas, keterbukaan pelayanan dan kegiatan kesejahteraan sosial.

Untuk memperkuat dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial di Indonesia perlu adanya 1) Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Sosial, 2) Reorganisasi sistem pendidikan pekerjaan sosial, 3) Pengembangan dan penerbitan buku teks, literature dan bacaan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial.

Kepustakaan

- Darwis, Rudi Saprudin. 2016. "Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia", dalam *Share Social Work Journal*, Vol. 6 No. 1, Juli 2016, Hal 93-14
- Dorita Setiawan. 2010. Isu Pendidikan Pekerjaan Sosial. melalui <http://www.socialworkers.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10%3Aisu-pendidikan-profesi&catid=2%3Aartikel-umum&Itemid=6> [17/09/2016])
- DuBois, Brenda L. and Karla Krogsrud Miley. 1992. *Social Work: an Empowering Profession*. Allyn and Bacon
- Hakim, Budi Rahman. 2010. *Rethinking Social Work Indonesia*. Jakarta : RMBOOKS
- Meyer, H. Carol and Mark A. Mattaini (Editors). 1995. *The Foundation of Social Work Practice*. NASW Press

Sumber lain:

- (1) Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga IPSPI 2016 – 2019

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- (3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional
- (4) http://www.kompasiana.com/ben10pku/pe-ntingnya-sertifikasi-profesi_56d67eb43493736107a2ff87 [17/09/2016]
- (5) <https://manajemenppm.wordpress.com/2013/04/29/standardisasi-dan-sertifikasi-profesi-sebuah-tren-atau-kebutuhan/> [17/09/2016]
- (6) <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html> [17/09/2016]